



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NINIK RAHAYU**
2. Jabatan : **ANGGOTA OMBUDSMAN RI**
3. NHK : **472505**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Bangunan Seluas 97 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 281.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 231.804.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.026.685.247**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 7.039.489.247**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 7.039.489.247

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.